

# LAMPIRAN

**SURAT KABAR**

**HARIAN**

**KOMPAS**





---

## KEMATIAN SIYONO

# Kapolri Janji Bertindak Tegas

ACEH BESAR, KOMPAS — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (PbJ) Badrodin Haiti berjanji akan bertindak tegas jika ada anggota-tanya yang terbukti melanggar prosedur.

Pernyataan ini disampaikan Badrodin terkait dugaan pelanggaran prosedur saat penangkapan terduga teroris Siyono pada 9 Maret lalu, yang berakhir dengan meninggalnya yang bersangkutan. "Siapa pun yang bersalah harus ditindak," kata Badrodin, di Aceh Besar, Aceh, Jumat (1/4).

Secara terpisah, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno menyatakan, dari pemeriksaan awal, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Siyono yang dilakukan anggota Densus 88 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku. "Perlawanan yang dilakukan petugas didasari *overmacht* (keadaan memaksa)" ujar Dwi.

Ia menambahkan, kekerasan

terjadi ketika petugas sudah membuka borgol Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilayah Prambanan, Yogyakarta. Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan Siyono meninggal karena mengalami pendarahan di bagian kepala.

Usaha membela diri anggota Densus 88 itu, kata Dwi, sesuai Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan data Polri, Siyono merupakan pemimpin wilayah Jamaah Islamiyah di Klaten, Jawa Tengah. Penangkapan Siyono merupakan hasil pengembangan dari penangkapan T bin Zahri alias AW pada 7 Maret di Temanggung, Jateng. Dalam pemeriksaan, AW mengaku diminta Siyono menyerahkan 2 pucuk senjata api, 400 butir peluru, dan beberapa granat (*Kompas*, 15/3).

### Investigasi

Meski demikian, Koalisi Ma-

syarakat Sipil untuk Keadilan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginvestigasi penyebab kematian Siyono. Hasil investigasi diharapkan dapat memberi penjelasan rinci dan terbuka dalam penangkapan yang dilakukan Densus 88.

"Kami minta Komnas HAM membentuk tim independen untuk mengungkap kematian Siyono. Kami tak ingin kejadian ini terulang," kata Bahrain, Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya mendukung otopsi jenazah Siyono dilakukan. Otopsi perlu dilakukan untuk memberikan opini alternatif dalam penangkapan Siyono.

"Kami akan melaporkan Densus 88 kepada Ombudsman RI untuk menyelidiki potensi maladministrasi dalam kasus itu," ujarnya. (GER/SAN)

---



KOMPAS, SEWEN EDISI PRASAKTA

**Tim** dokter forensik Muhammadiyah meninggalkan tempat pemakaman umum Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, setelah melakukan otopsi jenazah Siyono, Minggu (3/4). Komnas HAM dan PP Muhammadiyah melakukan otopsi untuk mengungkap alasan kematian Siyono terduga teroris asal Klaten, yang meninggal setelah ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri.

## PENEGAKAN HAM

# Jenazah Siyono Diotopsi

KLATEN, KOMPAS — Tim dokter forensik Pengurus Pusat Muhammadiyah melakukan otopsi jenazah Siyono, terduga teroris asal Klaten, Jawa Tengah, Minggu (3/4). Otopsi ini untuk mengungkap penyebab kematian Siyono yang meninggal setelah ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri.

Otopsi dilakukan di Tempat Pemakaman Umum Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, tempat jenazah Siyono dikuburkan. Tim dokter forensik PP Muhammadiyah terdiri atas sembilan dokter. Mereka antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Universitas Sebelas Maret, Solo; Universitas Diponegoro, Semarang; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto serta seorang dokter forensik Kepolisian Daerah Jateng. Proses otopsi yang dijaga polisi dan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah ini berjalan lancar sekitar 3,5 jam.

Berdasarkan data Polri, Siyono

takan, dari pemeriksaan awal, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Siyono yang dilakukan anggota Densus 88 sudah dilakukan sesuai prosedur standar operasi yang berlaku.

Kekerasan, lanjut Dwi, terjadi ketika petugas membuka borgol Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilayah Prambanan, Yogyakarta. Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus 88 sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan Siyono meninggal karena mengalami pendarahan di bagian kepala (*Kompas*, 2/4).

### Bekas luka

Ketua tim dokter forensik PP Muhammadiyah dr Gatot Suharto mengatakan, dari pemeriksaan awal ditemukan beberapa bekas luka akibat kekerasan benda tumpul dan diketahui ada tulang yang patah. Tim dokter sempat mencari luka tembak, tetapi tim memastikan tidak ada luka tembak. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian Siyono, tim forensik akan melakukan peme-

ndatang. Hasil itu selanjutnya akan diserahkan PP Muhammadiyah kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku pihak yang meminta dilakukannya otopsi.

Ajun Komisaris Besar Sumihasri Purwanti, dokter forensik Polda Jawa Tengah, juga menyatakan ada bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh Siyono. Namun, belum bisa dipastikan apakah luka tersebut sebagai penyebab utama kematian. "Untuk memastikan apakah luka itu penyebab kematian masih harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium," katanya.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, kasus meninggalnya Siyono harus diurut dengan tuntas. Pihaknya mengapresiasi Kapolri Jenderal (Pb) Badrodin Haiti karena keterbukaan Polri dan bersinergi bersama PP Muhammadiyah dalam proses otopsi jenazah Siyono. "Otopsi ini bagian dari penegakan hukum," katanya.

Komisiner Komnas HAM,

6 April 2016

# Kesalahan Prosedur

## Sedikitnya Lima Orang Diperiksa Terkait Siyono

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI mengakui adanya kesalahan prosedur standar operasi terkait pengawalan terduga teroris Siyono. Namun, kepolisian menegaskan tak ada unsur kesengajaan dari Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk menghilangkan nyawa Siyono.

Budanya, keterangan Siyono yang merupakan anggota inti Jamaah Islamiyah (JI) sangat diburuhkan. Siyono diduga mengetahui lokasi penyimpanan senjata.

Namun, apabila di kemudian hari terbukti ada kolusi dari anggota Detasemen 88 yang menyebabkan Siyono meninggal, kepolisian akan menindak anggota tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Chuslyan Selasa (54), di Markas Besar Polri Jakarta, mengungkapkan, pihaknya terus menegakkan lisan Siyono, baik secara kode etik maupun pidana. Divisi Profesi dan Rengseman (Propan) hingga kini memeriksa sedikitnya lima orang.

"Sudah ada 3-6 orang yang diperiksa, termasuk (yang terlibat) dari awal perjalanan," kata Anton.

Siyono meninggal saat dibawa Detasemen 88 menuju tempat penyimpanan senjata di daerah Pambanan, Yogyakarta. Dalam perjalanan itu, disebutkan Siyono meninggal setelah menyerang anggota Detasemen 88 yang mengawalinya.

Anton mengatakan, ada kesalahan prosedur standar operasi dalam pengawalan Siyono. Pertama, Siyono saat itu hanya di-

Jenderal (P) Arthur Tampi memutuskan, pihaknya mendapati adanya fraktur linier di tulang rusuk lima sebelah kanan di tubuh Siyono. Diduga, ini merupakan hasil tindak kekerasan.

Sementara itu, komisiner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nauraton, berharap ada kejelasan penyebab kematian Siyono. Pihaknya kini menunggu hasil otopsi yang dilakukan tim forensik dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Otopsi terhadap jenazah Siyono dilakukan di "Rumah Pemakaman Umum Desa Pajang Kecamatan Cawas, Klaten, yang merupakan tempat Siyono ditubuhkan. Tim forensik PP Muhammadiyah terdiri dari sembilan dokter dan beberapa ahli-ahlinya dan dokter forensik dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Gempur, 4/4).

### Ancaman anggota NIS

Terkait Negara Islam di Irak dan Suriah (NIS), data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) per Maret 2016 menunjukkan, ada 212 warga negara Indonesia (WNI) dewasa berada di Suriah yang terdiri dari 15 laki-laki dan 19 perempuan. Tidak heran itu, 51 anak-anak

pejuang teroris asing didominasi dasar ideologi bergabung dengan kekhilafan bertekad NIS. Insang-insang pejuang ekstrem juga menjadi alasan lain.

"Itu membuat laki-laki dewasa membawa diri dan anak-anak mereka ke Suriah. Secara umum, kami agak sulit membendung pertambahan jumlah pejuang teroris asing dari Indonesia karena banyak WNI yang tengah sekolah dan bekerja di wilayah Timur Tengah juga menuju Suriah," kata Budiono dalam diskusi "Problematisasi dan Antikipasi Indonesia dalam Menghadapi Fenomena Pejuang Teroris Asing", di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

BNPT, lanjutnya, membentuk tim khusus pemanggungan pejuang teroris asing. Sebab, mereka yang telah kembali ke Indonesia atau WNI yang telah dipulangkan dari negara di Timur Tengah menjadi ancaman utama aksi teror di Indonesia. Mereka ingin memicu upaya serangan NIS ke Palestina, Suriah dan Irak.

Menurut catatan BNPT, terdapat 43 laki-laki dewasa yang kembali dari Suriah setelah bergabung dengan milisi NIS dan 241 WNI telah dipulangkan dari Turki.

Selain WNI yang menuju ke luar negeri Budiono mengungkapkan, Indonesia juga menjadi lokasi pelatihan militer bagi warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi pejuang teroris asing. Pelatihan itu dilakukan di Pora, Sulawesi Tengah, bersama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wasilah. Sebanyak 10



KOMPAS/LASATI KUSINDIA

**Anggota** Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Siane Indriani, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas, dan tim dokter Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Cabang Jawa Tengah Gatot Suharto (kanan ke kiri) mengumumkan hasil otopsi tim forensik Muhammadiyah terhadap jenazah terduga Siyono, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4). Hasil otopsi menunjukkan, kematian Siyono disebabkan luka pada bagian dada yang menyebabkan kematian. Komnas HAM juga membuka paket yang diserahkan istri Siyono yang berisi uang Rp 100 juta dari polisi.

#### PENEGAKAN HAM

## Siyono Alami Penganiayaan

JAKARTA, KOMPAS — Hasil otopsi tim dokter dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengurus Pusat Muhammadiyah menyimpulkan, Siyono mengalami penganiayaan sebelum meninggal. Terduga teroris asal Klaten, Jawa Tengah, tersebut juga tidak menunjukkan tanda-tanda belas perlawanan.

"Tidak ditemukan upaya perlawanan dari Siyono. Kondisi otak juga baik. Namun, rusuk di dekat jantung dan tulang dada patah hingga berakibat fatal pada Siyono," kata komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4).

Hadir dalam acara ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar, dan Koordinator KontraS Haris Azhar.

Dalam acara itu, Busyro Muqoddas dan Siane membuka

berikan lima polwan kepada istri dan kembang Siyono. Bungkusannya itu berisi uang Rp 100 juta dalam pecahan Rp 100.000.

#### Pemeriksaan

Pada 3 Maret lalu, tim dokter forensik Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Komnas HAM melakukan otopsi jenazah Siyono. Langkah itu untuk mengetahui penyebab kematian Siyono yang meninggal setelah ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, 9 Maret lalu.

Sebelumnya, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno menyatakan, dari pemeriksaan awal, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Siyono sudah dilakukan sesuai prosedur standar operasi yang berlaku oleh Densus 88.

Kekerasan, lanjut Dwi, terjadi ketika petugas membuka borgol Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilayah Prambanan, Yogyakarta. Saat borgol

goda Densus 88 sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan pemimpin wilayah Jamaah Islamiyah di Klaten itu meninggal karena pendarahan di bagian kepala (*Kompas*, 2/4).

Busyro Muqoddas menyatakan, pihaknya tidak memperlakukan Densus 88 menduga seseorang sebagai teroris. "Kami mempersoalkan kematian korban serta perlakuan kemanusiaan dan keadaban yang seharusnya dilakukan aparat dalam menangani kasus terorisme," katanya.

Haris Azhar menuturkan, kasus ini memberi peringatan bahwa upaya memberantas terorisme harus dilakukan secara profesional dan bermartabat. "Hukum harus dijalankan secara baik dan prinsip yang berlaku umum," katanya. (ONG)



Lihat Video Terkait "Hasil Otopsi Siyono" di [kompas.sprint.com/otoasisiyono](http://kompas.sprint.com/otoasisiyono)

x14,06 in

13 April 2016

ASUS SIYONO

## Densus 88 Siap Dikoreksi, Polri Lakukan Evaluasi

KARTA, KOMPAS — Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia siap dikoreksi jika dalam pelaksanaan tugasnya melaku-  
kan evaluasi. Polri tetap me-  
lakukan evaluasi setiap periode  
tanggap kinerja Detasemen  
88.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Irodin Haiti di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (12/4), mengatakan akan mengajukan otopsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu penilaian proses internal dalam kesalahan prosedur penanganan terduga teroris Siyono.

Kami berterima kasih atas hasil otopsi Siyono. Kami juga memiliki mekanisme tersendiri untuk pengawasan melalui Ibtwan (Inspektorat Pengawasan Umum) dan pemeriksaan diluar Divisi Profesi dan Pengamanan. Nanti akan kami coba hasil otopsi itu dengan ases internal," ujar Badrodin.

mengungkapkan, untuk terduga teroris tertentu memang tidak diborgol dalam penanganan, untuk menarik hati agar mereka dapat kooperatif dan merasa nyaman, sehingga penyidik dapat menggali informasi.

Karena itu, Tito menekankan, pimpinan Densus 88 perlu selalu mengingatkan anggotanya untuk mematuhi SOP (prosedur standar operasi) agar kasus seperti ini tidak terulang. Dalam kasus Siyono, kata Tito, terjadi kesalahan prosedur karena pengawasan yang tidak cukup sehingga dia punya kesempatan melawan.

Secara terpisah Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, tidak ada alasan untuk terburu-buru membahas revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aspek penegakan hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme harus benar-benar dipertimbangkan.

Urgensi menyeimbangkan penegakan hukum dengan pen-

gakan HAM semakin  
ka setelah kasus Siyo

"Tidak ada alasan terburu-buru membahas terorisme. Sebaliknya, prosedur untuk semesta tidak apriori menolak depan, kami akan memperbaiki materi dengan paradigma yang sip pada penegakan HAM," kata Busyro cengar pendapat Konwan Perwakilan Rakyat Komisi Nasional Hak Pusat Muhammadiyah

Wakil Ketua Komisi Fraksi Partai Gerindra J Mahesa mengatakan nunggu catatan dan ri PP Muhammadiyah nas HAM untuk materi revisi UU Ten itu akan dijadikan pedan masukan bagi saat menyikapi draf rorisme yang diusul rintah. (SAN/AGE)



**Pimpinan Densus 88 perlu selalu mengingatkan anggotanya untuk mematuhi SOP.**

ia menegaskan, anggota Densus 88 tidak pernah bemiat melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian terduga teroris. "Kami tetap lakukan evaluasi setiap periode terhadap kinerja Densus yang baik atau tidak," kata Kapolri.

### Tidak diborgol

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian

**SURAT KABAR**

**HARIAN**

**REPUBLIKA**

**15 Maret 2016**

# Polri Akui Anggota Densus 88 Lalai

● EDY SETYOKO

**Keluarga mendesak Polri melakukan autopsi forensik.**

JAKARTA — Pihak Mabes Polri mengakui ada kelalaian petugas yang berujung pada kematian Siyono (34 tahun), warga Klaten, Jawa Tengah, ketika Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) mencocok yang bersangkutan, pekan lalu. Kadiv Humas Mabes Polri Anton Charliyan mengindikasikan ada prosedur pengawalan yang dilanggar dalam kejadian itu.

Menurut Anton, anggota Densus 88 mengawal Siyono dengan keamanan yang minim. Saat kejadian, hanya seorang yang mengawal Siyono, sedangkan satu lainnya mengemudikan kendaraan. Selain itu, kata Anton, petugas pengawal juga menyalahi prosedur dengan melepaskan penutup mata dan borgol Siyono.

"Kami juga menyangkan. Kami juga mempertanyakan kenapa cuma sendiri, karena yang bersangkutan mata ditutup dan diborgol," kata Kadiv Humas Mabes Polri Anton Charliyan, Senin (14/3). Ia mengatakan,

Propam langsung melakukan penyelidikan terkait tewasnya Siyono. "Secara internal akan kita tindak," kata dia.

Sebelum tewas, Siyono dijemput tiga petugas Densus 88 pada Selasa (8/3). Pada Rabu (9/3), Densus 88 menggeledah tempat tinggal Siyono dan orang tuanya yang juga lokasi TK Roudatul Athfal Terpadu (RAT) Amanah Ummah saat jam belajar.

Petugas polisi kemudian membawa ayah beranak lima itu untuk menunjukkan lokasi tempat penyimpanan senjata api yang menurut polisi diketahui yang bersangkutan. Namun, upaya itu tak berhasil.

Setelah itu, saat tiba di satu tempat di Prambanan, Klaten, Siyono meminta penutup wajah dan borgolnya dilepas. Menurut Anton, saat itulah Siyono melakukan perlawanan dan memukul anggota Densus 88. Anggota Densus 88 membalas dengan tangan kosong.

Akibat saling pukul di dalam mobil petugas, kendaraan sempat menghantam pembatas jalan. Siyono masih melakukan perlawanan hingga kepalanya terbentur besi dan pingsan. Siyono kemudian dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Yogyakarta, tetapi meninggal dunia dalam perjalanan.

**Indepth**  
**Dana Densus 88 Ditimbang Ulang**  
**Hlm- 9**

Menurut Anton, Siyono adalah anggota Jamaah Islamiyah dan bertugas sebagai perakit senjata api. Kedudukan Siyono, kata Anton, juga termasuk tinggi dan diyakini berperan sebagai panglima. Namun, sejauh ini polisi belum menemukan keterkaitan Siyono dengan penyerangan di Jalan Thamrin maupun hubungannya dengan jaringan Santoso.

Keluarga Siyono meminta kepolisian melakukan autopsi forensik agar kasus tersebut menjadi jelas. "Kita meminta rekomendasi untuk autopsi forensik, biar semuanya jelas," ujar kuasa hukum dari keluarga Siyono, Sri Kalono, di Klaten, kemarin.

Menurut Sri Kalono, berdasarkan pengamatan dan rekaman video saat proses penggantian kain kafan, pihaknya menemukan kejanggalkan pada kondisi jenazah Siyono. Menurut dia, kondisi tersebut mustahil karena perkelahian.

"Ada lebam pada kedua mata. Lebam biru kehitam-hitaman pada pelipis, jadi pipi sebelah kanan sampai dahi bagian tengah," katanya.

Kemudian juga, bagian tulang hidung Siyono patah. Lalu, kepala bagian belakang saat pembukaan kain

kafan masih meneteskan darah. Kedua kaki, dari paha sampai ke mata kaki, bengkok hitam.

Sri Kalono mengungkapkan, hingga pemakaman almarhum pada Ahad (13/3) dini hari, keluarga belum menerima surat keterangan kematian dari institusi yang bersangkutan. Ia meminta penyebab kematian Siyono diungkap sejas-jelasnya agar kasus Siyono tidak kembali berulang.

Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Mabes Polri Brigjen Arthur Tampi mengiyakan, Siyono meninggal akibat benda tumpul. "Kiriman jenazah diantar densus dari Yogyakarta. Kita (tim Labfor Mabes Polri) langsung melakukan pemeriksaan," kata dia, kemarin.

Arthur menuturkan, melalui pemindaian, dia melihat ada luka memar dan pendarahan di rongga kepala bagian belakang Siyono. Selain itu, hasil visum juga menunjukkan ada beberapa luka memar di wajah, tangan, dan kaki.

Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri juga telah melakukan visum di RS Bhayangkara Yogya terhadap anggota Polri yang berkelahi dengan Siyono. "Ada luka memar leher kiri dan kanan. Luka gores pada lengan bawah kiri dan lengan bawah kanan," kata dia. ■ e21 ed: fitriyan zamzami

# DENSUS 88 MASIH PAKAI GAYA LAMA

● MUHAMMAD SUBARKAH,  
DADANG KURNIA

## Kelalaian Densus 88 membahayakan petugas polisi lainnya.

JAKARTA — Cara-cara penindakan dan pencegahan terorisme oleh Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) disoroti setelah tewasnya Siyono (34 tahun), seorang warga Klaten, Jawa Tengah, ketika dalam penguasaan satuan tersebut. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai cara-cara yang belakangan digunakan Densus 88 mirip dengan penindakan ketika Orde Baru.

"Ya seperti mengopi saja, tak ada beda dengan zaman penumpasan Komando Jihad. Semuanya serbamasif, terstruktur, dan sistematis," kata Busyro kepada *Republika*, Selasa (15/3). Busyro sepanjang 1980-an kerap menangani dan membela para terduga anggota Komando Jihad yang ditangkap secara serampangan oleh aparat Orde Baru.

Tak berbeda dengan masa sekarang, kata Busyro, pada masa itu juga banyak terjadi kejanggalan ketika

aparat intelijen melakukan operasi penumpasan Komando Jihad. Siapa pun mereka tangkap, tak peduli latar belakang asal usul sosial, tingkat pendidikan, dan ekonomi.

Ia menegaskan, perlu ada evaluasi soal penanganan terorisme. "Sudah sampai ganti enam kapolri, kekuatan mereka (teroris—Red) tetap belum juga tuntas. Ada apa kok pengikat mereka tak habis-habis? Jadi, itulah pertanyaannya sekarang," kata Busyro.

Siyono dijemput tiga petugas Densus 88 pada Selasa (8/3). Pada Rabu (9/3), Densus 88 menggeledah tempat tinggal Siyono dan orang tuanya yang juga menjadi lokasi TK Roudhatul Athfal Terpadu (RAT) Amanah Ummah.

Petugas polisi kemudian membawa ayah beranak lima itu untuk menunjukkan lokasi tempat menyimpan senjata api yang menurut polisi diketahui yang bersangkutan. Namun, upaya itu tak membuahkan hasil.

Menurut keterangan Mabes Polri, setelah itu, saat tiba di satu tempat di Prambanan, Klaten, Siyono meminta penutup wajah dan borgolnya dilepas. Siyono kemudian melakukan perlawanan dan memukul anggota Densus 88. Mabes Polri mengakui, ada ke-

lalaian penjagaan Siyono karena hanya dua petugas yang mengawal.

Bagaimanapun, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah menganggap meninggalnya Siyono penuh kejanggalan. Menurut dia, perlu kajian serius untuk mengungkap sebab meninggalnya Siyono itu.

Anton khawatir peristiwa yang terjadi kepada Siyono ini dapat menimbulkan kelompok baru yang lebih radikal. "Itu sebagai balas dendam terhadap anggota-anggota Polri di lapangan yang bisa saja tidak berdosa," kata Anton.

Mantan wakil ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) As'ad Said Ali mengatakan, polisi harus tetap menjelaskan kejadian sebenarnya kepada masyarakat. "Menurut saya, harus dibuktikan saja oleh pihak kepolisian apakah benar adanya perlawanan itu. Ini sekaligus untuk menepis adanya kecurigaan publik dan menjadi pelajaran agar kejadian seperti ini tidak terulang," kata mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Menurut dia, saat ini Polri sudah sangat terbuka dalam menjawab kritik dari masyarakat. Adanya pengakuan dan penjelasan yang masuk

akal dari Polri justru akan menguntungkan polisi. Namun, memang ada satu-dua kasus yang memerlukan pengkajian lebih jauh.

Terkait kasus terbunuhnya Siyono, sejumlah pihak menilai perlu ada mekanisme rehabilitasi dan permintaan maaf dari aparat. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan klausul rehabilitasi nama baik bagi terduga teroris yang tak terbukti bersalah dalam revisi UU Antiteorisme. Ia mengatakan, pemerintah masih mengkaji tempat untuk menyisipkan soal permintaan maaf karena kesalahan yang dilakukan aparat dalam undang-undang tersebut.

Luhut mengatakan, aparat tidak bisa lepas dari kesalahan. Jika memang terduga teroris terbukti tidak bersalah, menurut dia, pemerintah wajib meminta maaf. "Saya pikir kalau kita salah, ya, harus minta maaf dong. Kita bukan dewa, bisa saja membuat kesalahan," ujar Luhut.

Mengenai kematian Siyono, ia berjanji akan mengecek ulang prosedur tetap dan kejadian saat itu. "Ya, saya akan cek. Saya tanya nanti, ya, ke Densus 88," ujar Luhut. Namun, ia yakin polisi tak mungkin melakukan penindakan tegas jika tidak ada perlawanan. ■ ed:fitriyan.zamzami

**Indepth**  
Keluarga  
khlaskan  
Siyono  
Hlm- 9

# Keluarga Ikhhlaskan Siyono

● EDY SETYOKO

KPAI persoalkan tindakan Densus 88 di depan anak-anak.

KLATEN — Keluarga besar Siyono (34), warga Klaten, Jawa Tengah, yang tewas di tangan anggota Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) menyatakan telah mengikhhlaskan kepergian yang bersangkutan. Sikap tersebut berkebalikan dengan sehari sebelumnya saat mereka masih meminta kejelasan atas kematian Siyono.

"Ya, dari pihak keluarga sudah mengikhhlaskan. Keluarga sudah merelakan keadaan adik saya. Bagaimana napun, itu yang terbaik. Jadi, untuk langkah berikutnya ingin kembali lagi bisa bermasyarakat seperti yang lainnya, nyaman, tidak tertekan dari mana pun," kata Wagiyono, kakak Siyono, kemarin.

Wagiyono dan Marso Diyono, ayah Siyono, juga mendatangi kantor kepala desa Pogung, Cawas, Klaten, kemarin pagi. Keduanya diterima langsung oleh

Kades Joko Widoyo dan Kapolsek Cawas AKP Totok Mugiyanto.

Selang satu jam mengobrol di ruangan tertutup, keduanya langsung pergi. "Mereka dia merasa terusik. Maklum, habis kehilangan anggota keluarga. *Kes-ripanan* (kematian) Siyono. Dia minta perlindungan, minta ketenangan," ujar Kades Pogung, Joko Widoyo, selepas pertemuan kemarin.

Sehari sebelumnya, keluarga Siyono sempat meminta kepolisian melakukan autopsi forensik agar kasus tersebut menjadi jelas. "Kita meminta rekomendasi untuk autopsi forensik, biar semuanya jelas," ujar Sri Kalono yang mengklaim sebagai kuasa hukum keluarga Siyono.

Menurut Sri Kalono, berdasarkan pengamatan dan rekaman video saat proses penggantian kain kafan, pihaknya menemukan kejanggalan pada kondisi jenazah Siyono. Menurut dia, kondisi tersebut mustahil karena perkelahian.

"Ada lebam pada kedua mata. Lebam biru kehitam-hitaman pada pelipis, jadi pipi sebelah kanan sampai dahi bagian tengah," katanya. Kemudian, bagian tulang hidung Siyono patah. Lalu,

kepala bagian belakang saat pembukaan kain kafan masih ada bekas darah. Kedua kaki, dari paha sampai ke mata kaki, bengkak hitam.

## Pengeledahan

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 menyusul pengeledahan di TK Rouddatul Athfal Terpadu Amanah Ummah Klaten yang dilakukan di depan anak-anak.

"Penangkapan dan pengeledahan tersebut tidak memperhatikan ikhtiar perlindungan anak," kata Wakil Ketua KPAI, Susanto, kemarin. Pengeledahan itu dilakukan menyusul penangkapan atas Siyono. TK Amanah Ummah kebetulan menggunakan bagian rumah Siyono dan orang tuanya sebagai ruang belajar-mengajar.

Susanto mengatakan, evaluasi yang perlu dilakukan terhadap Densus 88 tidak hanya mengenai penangkapan dan pengeledahan di TK Rouddatul Athfal, Klaten, saja, tetapi juga banyak tindakan sebelumnya yang dapat dikategorikan kurang memperhatikan prinsip-prinsip

dan ikhtiar perlindungan anak. Menurut Susanto, pengeledahan yang dilakukan Densus 88 di sekolah telah membuat anak-anak ketakutan.

Densus 88 bahkan juga pernah melakukan penangkapan terduga teroris di depan balita. Selain itu, Densus 88 juga pernah menangkap anak-anak yang diduga terlibat teroris. Dalam penangkapan tersebut, Densus 88 tidak terlihat memiliki pola yang berbeda dengan penangkapan terduga teroris dewasa.

"Padahal seharusnya berbeda sekali. Anak yang diduga terlibat terorisme atau menjadi simpatisan kelompok radikal hanyalah korban dari beberapa faktor, seperti indoktrinasi, dijabak, diradikalisasi, dan lain-lain," tuturnya.

Susanto menilai Densus 88 dalam melakukan penangkapan terduga teroris sering kali berfokus pada hasil tetapi menafikan proses. Seharusnya, proses penangkapan juga menjadi perhatian Densus 88. "Pengeledahan di sekolah dan penggerebekan di depan anak-anak merupakan bentuk menafikan proses etika perlindungan anak," ucapnya.

■ antara ed: fitriyan zamzami

# Densus 88 Bisa Dipidana

● AGUS RAHARJO, RAHMAT FAJAR

## Kasus Siyono jadi pertimbangan revisi UU Antiterorisme.

JAKARTA — Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 yang terbukti melanggar hukum dapat diadili secara pidana. Pelanggaran yang dimaksud termasuk proses penahanan yang membuat seorang terduga teroris meninggal dunia.

"Sangat bisa diproses pidana, siapa pun bisa," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan kepada *Republika*, Jumat (1/4). Hal tersebut disampaikan Benny menyusul kematian Siyono (34 tahun), warga Klaten, Jawa Tengah, yang tewas setelah ditangkap Densus 88.

Benny menambahkan, Densus 88 juga harus menjelaskan tindakannya yang membuat Siyono meninggal dunia. Penjelasan kepolisian selama ini, menurut Benny, dinilai masih sepihak. Sebab, dari hasil investigasi Komnas HAM, ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan densus dalam penangkapan Siyono.

Ia menjanjikan, Komisi III sebagai perwakilan rakyat akan meminta

penjelasan kepada Kapolri untuk membuka kasus ini. Selain itu, Komisi III akan menjadikan kasus tersebut sebagai catatan ketika membahas revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Siyono ditangkap petugas Densus 88 pada Selasa (8/3) lalu. Dua hari kemudian, keluarganya diberi tahu bahwa yang bersangkutan tewas setelah berusaha melawan petugas.

Pihak keluarga, terutama istri Siyono, Suratmi (29), tak memercayai hal tersebut. Ia kemudian meminta bantuan hukum dari PP Muhammadiyah. Sejuah ini, advokasi tersebut juga didukung Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Komnas HAM, LSM Kontras, dan sejumlah lembaga lainnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, pemberantasan terorisme memang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun, dia meminta pemerintah menjalankan seluruh prosesnya secara transparan. "Kami berharap seluruh prosesnya dilakukan dengan saksama dan dalam akuntabilitas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Haedar sesuai melakukan audiensi de-

ngan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, kemarin.

Haedar melanjutkan, dalam kasus Siyono ini, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral melakukan advokasi demi menegakkan keadilan atas nama kemanusiaan. Haedar menegaskan, negara wajib menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan melindungi setiap warganya.

Komnas HAM mencatat bahwa sejauh ini ada sebanyak 121 warga, termasuk Siyono, yang ditewaskan Densus 88 dalam operasi pemberantasan terorisme. Pihak kepolisian selalu menggunakan alasan bahwa pihak-pihak yang diduga terlibat organisasi terorisme tersebut melakukan perlawanan. Hingga saat ini, belum pernah ada petugas Densus 88 yang diproses hukum terkait tewasnya para terduga teroris tersebut.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasmu) Polri Komjen Dwi Priyatno mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya akan menindak apabila memang ada indikasi pelanggaran HAM dari anggota Polri, termasuk terkait kematian Siyono. "Sampai sejauh ini kita belum selesai, pemeriksaannya masih berlangsung," ujar Dwi, di Mabes Polri, kemarin.

Dwi mengklaim sudah memiliki

laporan awal dari pemeriksaan itu. Menurut Dwi, Densus 88 sebetulnya sudah menerapkan prosedur operasi standar (SOP) dalam kasus Siyono.

Menurut dia, petugas polisi juga dapat melakukan tindakan seimbang jika ada perlawanan dari terduga teroris. "Polisi bisa melakukan tindak seimbang itu. Dalam KUHP dilindungi," kata Dwi. Meski begitu, ia menyilakan jika keluarga hendak menempuh jalur hukum terkait tewasnya Siyono.

Sedangkan, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Miko Ginting, meragukan pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri atas kematian Siyono. Menurut Miko, kematian Siyono merupakan penyiksaan yang berujung kematian dan masuk sebagai tindak pidana.

Untuk itu, ia meminta kasus kematian Siyono dibawa ke jalur hukum. Dengan begitu, bisa diperjelas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi serta ada hukuman bagi pelaku.

Terlebih, lanjut Miko, status Siyono ketika diduga mengalami pelanggaran HAM masih sebagai terduga dan bukan tersangka. Miko menegaskan, status terduga tidak ada dalam nomenklatur hukum di Indonesia, apalagi Siyono dikembalikan ke keluarga dalam kondisi tidak bernyawa. ■ e25 ed: fitriyan zamzami

**Indepth**  
Warga Pogung  
Tutup Mulut  
Hlm- 9

# Warga Pogung Tutup Mulut

● EDY SETIYOKO

Komnas HAM menyatakan akan tetap menggelar autopsi.

KLATEN—Rencana autopsi terhadap jenazah Siyono (34 tahun), warga Desa Pogung, Cawas, Klaten, ditunda menyusul penolakan warga. Saat ditemui *Republika*, tak ada warga yang berani buka suara terkait penolakan tersebut.

Suharno (56), salah seorang ketua RW (rukun warga) di Desa Pogung, mengunci mulut ketika ditanya pernyataan warga soal penolakan autopsi jenazah Siyono. Ia langsung menghindar dan pergi tanpa pamit ketika ditemui di Dukuh Brengkungan, tempat tinggal almarhum.

Demikian juga salah seorang anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) yang enggan dituliskan namanya, memilih diam ketika ditanya soal ini. Ia sontak mengeloyor begitu saja sambil bilang, "Tanyakan saja Pak Kades."

Kepala Desa (Kades) Pogung Djoko Widoyo dari awal berpesan kepada wartawan agar pertanyaan yang disampaikan tidak *neko-neko*. "Jangan tanya yang sulit dijawab. Tolong teman-te-

man wartawan, kalau *nulis* yang baik-baik saja. Ciptakan iklim kondusif biar warga kami aman," pintanya.

Menurut pengakuan Djoko, warga bersama tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa tetap kukuh pada kesepakatan awal. Masyarakat tetap menolak dilakukan autopsi jenazah Siyono.

Jika autopsi dilakukan, jenazah Siyono tak boleh dikuburkan di Pogung dan keluarga yang bersangkutan mesti hengkang. Kesepakatan ini, kata dia, murni keputusan bersama masyarakat.

Ia mengatakan, Pemdes Pogung memegang surat pernyataan yang dibuat warga. Dan, surat itu sudah diberikan ke polisi untuk dijadikan pegangan jika sewaktu-waktu rencana autopsi dilaksanakan.

Djoko mengklaim, warga tak ingin autopsi karena mengalami trauma berat. Sejak penangkapan, pengeledahan, hingga pemakaman jenazah Siyono, Desa Pogung banyak didatangi orang luar.

Permintaan autopsi sebelumnya disampaikan istri Siyono, Suratmi (29 tahun). Ia menyambangi PP Muhammadiyah dan menegaskan menginginkan keadilan untuk suaminya. PP Muhammadiyah, Komnas HAM

dan sejumlah lembaga lainnya mengiyakan permintaan itu.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menegaskan, menjanjikan proses autopsi akan tetap dilakukan demi menguak penyebab kematian Siyono. Ia mengatakan, baik Komnas HAM maupun PP Muhammadiyah, terus melakukan persiapan untuk melakukan proses autopsi.

Manager mengaku telah dan akan terus bertemu dengan istri dari Siyono, Suratmi, untuk memantapkan tekad melakukan autopsi jenazah suaminya.

Ia mengungkapkan, intimisasi terus diterima keluarga, mulai dari penolakan tiba-tiba warga akan proses autopsi sampai pengusiran kalau autopsi dilakukan. Namun, ia menekankan keluarga Siyono saat ini di bawah pengawasan Komnas HAM.

Menurutnya, tidak semua warga Pogung setuju dengan larangan autopsi tersebut. "(Penolakan) lebih tepatnya dilakukan aparat desa," kata dia.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sementara ini, makam Siyono dijaga para kader muda Muhammadiyah yang tergabung dalam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).

■ c25/c21/qommaria rostanti ed:  
fitriyan zamzami

4 April 2016

/2016

# ng-royong untuk Almarhum Siy

Antiteror 88 (Densus 88).

Proses autopsi jenazah

Siyono jadinya akan dimulai begitu tengah malam lewat. Autopsi yang rencananya digelar dokter dari PP Muhammadiyah tersebut sebelumnya mendapat penolakan dari aparat desa yang mengatasnamakan warga.

Namun, menjelang autopsi, tokoh masyarakat dan aparat desa tak ada yang menampakan batang

hidungnya. Gerbang kantor

Balai Desa Pogung

digembok rapat. "Kabar banya, Pak Kades sakit," ujar seorang warga.

Sepanjang jalan pintu

masuk Kampung

Brengkungan dipenuhi

anggota Komando Kesiapsiagaan

Pemuda Muhammadiyah (Kokam),

ribuan anggota ormas Islam yang datang dari Yogyakarta dan Solo Raya.

Sejak Sabtu (2/4) pagi, otomatis

 In depth

Poli Minta

Publik Harga

Hukum

Hlm- 9

TPK  
Kok  
pan  
mal  
dipe  
lore  
jala  
lism  
ratu  
hita

*Bergotong-royong untuk Siyono ..... dari hlm 1*

makam. Mereka menenteng senjata laras panjang. Suasana agak tegang. "Kami diperintah dari pimpinan Polri untuk mengamankan lokasi," ujar seorang perwira pertama lewat *handy talky*.

Namun, beberapa menit kemudian, mereka ditarik keluar dari makam. Penggalian makam dan proses autopsi berjalan lancar. Tidak ada aksi penolakan warga terhadap pembongkaran makam dan autopsi jenazah Siyono.

"Surat pernyataan penolakan autopsi itu ternyata penuh dengan kepalsuan," ujar fungsionaris PDM Muhammadiyah Husni Thamrin, Ahad (3/4). Menurut dia, anggota Kokam yang melakukan persiapan pelaksanaan autopsi sejak Sabtu (2/4) justru dibantu warga sepenuhnya. "Kami semalam sampai tidak tidur menyiapkan tenda di atas lokasi makam almarhum. Tenda terpal, bambu, selang, ember, air, cangkul, dan semua peralatan yang menyiapkan warga sekitar. Mereka membantu kami sampai selesai," tuturnya.

Komandan FUI (Front Umat Islam) Kabupaten Klaten, Basyuno, mengiyakan pernyataan Husni Thamrin. Ia mengisahkan, warga bergotong-royong membantu, persis seperti upacara pemakaman jenazah pada umumnya.

Yang membuat hati trenyuh, kata Basyuno, banyak di antara ibu-ibu kampung menyiapkan makanan. Ada yang menyuguhkan ketela rebus, pisang rebus, serta minuman teh dan kopi. Makanan-makanan yang berasal dari tanaman kebun tersebut dimasak bersama.

Suparni (50), warga Dukuh Brengkungan, RT 11, RW 5, juga menyatakan kaget soal pemberitaan bahwa warga menolak pembongkaran jenazah Siyono. "Mboten wonten niku yen warga menolak," ujarnya menyangkal kabar penolakan warga. Ia

menegaskan, kebanyakan warga justru merasa kasihan dengan keluarga almarhum.

Sementara, di makam, puluhan Kokam bermandikan lumpur. Seragam celana dan baju loreng penuh dengan lumpur. Mereka berjam-jam berjuang melawan derasnya air yang menggenangi makam. Setelah berhasil mengangkat jenazah, mereka membersihkan lumpur dalam kubangan sebelah utara makam.

Persyarikatan PP Muhammadiyah menyatakan bersyukur atas lancarnya pelaksanaan autopsi. "Kami atas nama persyarikatan Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada warga dan aparat keamanan TNI dan Polri yang membantu pelaksanaan autopsi," tutur Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam jumpa pers di teras rumah isteri Siyono, Suratmi (29 tahun), selepas proses autopsi.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas didampingi Komisio-ner Komnas HAM Manager Nasution juga mengucapkan syukur atas pelaksanaan autopsi jenazah Siyono yang berjalan aman dan lancar.

Sejak pagi sebelum pelaksanaan autopsi, kata Busyro, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menghubungi dia. Kata dia, Polri mempersilakan tim dokter forensik Muhammadiyah melakukan autopsi, tetapi harus didampingi dokter forensik dari Polri.

Akhirnya, pelaksanaan autopsi melibatkan sembilan tim dokter Muhammadiyah dipimpin dr Gatot Suharto dari Fakultas Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang juga Ketua Majelis MPK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng. Ia dibantu dokter forensik dari fakultas kedokteran UII, UGM, UAD, UNS, UMS, dan UMY. Sedangkan, tim forensik Polri diwakili dr Hasri dari Polda

Jateng.

"Kita masih tunggu hasilnya bagaimana. Hasil forensik nanti untuk menentukan langkah selanjutnya," kata Busyro.

Ketua tim dokter forensik, dr Gatot Suharto, menuturkan, pelaksanaan autopsi berjalan sekitar tiga setengah jam. Menurut dia, kondisi jenazah masih bagus. Selain melibatkan dokter forensik, autopsi juga melibatkan dokter patologi anatomi.

Sejauh ini, yang bisa disampaikan tim autopsi, mereka menemukan bekas luka intravital akibat benturan benda tumpul di beberapa tempat di tubuh Siyono. Sebelum tewas, Siyono juga mengalami sejumlah patah tulang. Bagian-bagian yang luka tersebut diambil sampelnya dan nantinya diuji di laboratorium.

Menurut Gatot, masih butuh sepekan hingga 10 hari setelah autopsi dilakukan hingga hasil autopsi menyeluruh pungkas. Hasil autopsi akan diserahkan kepada Komnas HAM sebagai pihak yang berkepentingan.

Komisio-ner Komnas HAM Hafid Abbas menegaskan, yang mereka lakukan sebagai lembaga independen adalah pendampingan dan pemantauan sesuai amanah undang-undang. Ia ingin melalui autopsi ini proses kematian Siyono bisa terbuka ke publik. Nantinya biar masyarakat yang menilai kejadian tersebut.

Hafid tidak ingin menduga hasil autopsi. Selain itu, sebagai negara demokrasi, kata Hafid, tidak ada yang ditutup-tutupi dari kerja yang dilakukan tim dokter forensik. "Ini merupakan bagian dari proses pendidikan bangsa. Dan, tradisi demokrasi dalam pekerjaan ini sangat tangguh. Ini terbukti, pelaksanaan autopsi yang semula ditolak ternyata berjalan lancar, aman, dan kondusif. Alam cukup kondusif," tambahnya.

■ ed: fitriyan zamzami

# Polri Sidangkan Penangkap Siyono

● DADANG KURNIA,  
WISNU AJI PRASETIYO

Kasus Siyono akan dijadikan evaluasi penanganan terorisme oleh kepolisian.

JAKARTA — Pihak Mabes Polri menjanjikan pengusutan kasus tewas Siyono (34 tahun) selepas ditangkap petugas Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) di Klaten, Jawa Tengah, bulan lalu. Petugas kepolisian yang bersangkutan bisa ditindak pidana bila nantinya terbukti bersalah.

"Nanti ada sidang kode etik yang akan digelar oleh Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan Polri). Kita juga walaupun dalam tugas apabila anggota melakukan pelanggaran dan kesalahan, akan kita usut, baik kode etiknya maupun pidananya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Selasa (5/4). Siyono, warga Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, ditangkap Densus 88 pada Selasa (8/3) lalu. Dua hari kemudian, pihak keluarga diberi tahu bahwa yang bersangkutan tewas setelah melakukan perlawanan terhadap petugas.

Sejumlah lembaga, seperti PP Muhammadiyah, Komnas HAM, Puhham UII, dan LSM Kontras, kemudian melakukan advokasi atas kematian tersebut. Mereka menilai, ada sejumlah kejanggalaan dalam penangkapan yang akhirnya menyebabkan Siyono tewas.

Menurut Anton, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Polri, ada beberapa kesalahan prosedural yang dilakukan anggota Densus 88 saat melakukan penangkapan Siyono, di antaranya membiarkan Siyono tak terborgol tangannya. Selain itu, menurut Anton, Siyono sempat hanya dikawal satu orang petugas dan satu sopir.

Anton menegaskan, kasus Siyono

akan dijadikan bahan evaluasi Polri terkait prosedur penangkapan teroris. Dengan demikian, ke depannya tidak ada lagi kesalahan prosedur yang dilakukan anggota Densus 88. "Termasuk perbaikan prosedur. Nanti akan kita evaluasi harusnya bagaimana," ucap Anton.

Kendati demikian, Anton juga menyangkal sejumlah temuan tim

yang mengadvokasi kasus kematian Siyono. Menurut dia, tak benar Siyono ditangkap tanpa surat penahanan.

Ia mengklaim bahwa petugas kepolisian sudah berkoordinasi dengan aparat desa sebelum menangkap Siyono. "Apa kalau kita koordinasi dengan RT-RW cukup memperlihatkan daun? *Kan* tidak mungkin," kata Anton.

Anton juga membantah bahwa Siyono ditangkap di rumah ibadah. Ia juga membantah temuan tim advokasi bahwa peroses penangkapan Siyono terjadi di hadapan anak kecil. "Apa benar ada anak TK yang trauma? Mana buktinya?" ujarnya.

Ia juga mengklaim bahwa penangkapan Siyono merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sembilan orang anggota organisasi Jemaah Islamiyah (JI) pada Mei 2014. Menurutnya, dari keterangan sejumlah pihak yang ditangkap, Siyono berperan sebagai pengumpul senjata untuk pergerakan tersebut. Dengan kematiannya, kata Anton, lokasi persembunyian senjata-senjata tersebut sukar diketahui.

Sebelumnya, para pihak yang terlibat advokasi menekankan bahwa pembelaan pada Siyono bukan pembelaan terhadap terorisme. Hal yang mereka persoalkan adalah prosedur penangkapan dan tewasnya warga negara yang statusnya bahkan belum menjadi tersangka tindak pidana apa pun.

"Hanya membela hak-hak seorang warga negara yang baru dianggap terduga teroris," kata Komisiner Komnas HAM Maneger Nasution.

Terlebih, Siyono bukan orang pertama yang tewas di tangan pasukan Densus 88 tanpa proses pengadilan dan status hukum yang jelas. Sejauh ini, Komnas HAM mencatat sebanyak 121 orang ditewaskan Densus 88 tanpa proses pengadilan. Pembelaan terhadap Siyono, kata Maneger, adalah upaya agar kasus serupa tak lagi terjadi.

Sementara, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan meyakini, Densus 88 sudah bekerja sesuai prosedur dalam penangkapan Siyono. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan ada penindakan terhadap para petugas bila nantinya terbukti bersalah. "Pasti ada tindakan administratif kalau memang salah prosedur," ujar Luhut. ■ ed: fitriyan zamzami



# Pembelaan Polri Dinilai Janggal

● DYAH RATNA META NOVIA

JAKARTA — Pihak Mabes Polri melayangkan sejumlah sangkalan terhadap klaim pihak-pihak pengadvokasi kasus kematian Siyono. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak justru menilai, pembelaan kepolisian tersebut janggal.

Dahnil menyinggung pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan yang mengatakan, keluarga tidak mau diautopsi dan minta segera dikuburkan. "Padahal, sebelumnya (kepolisian) mengatakan bahwa jenazah Siyono sudah dilakukan autopsi dan menemukan penyebab kematiannya karena benturan keras di kepala," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, kemarin.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan keluarga, kepolisian sempat menghalang-halangi keluarga membuka kafan Siyono. Sejumlah petugas polisi disebut meminta jenazah Siyono segera dikuburkan saat tiba di Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (12/3).

Dahnil juga mengklarifikasi bahwa dokter forensik Muhammadiyah memang tidak pernah menyatakan kepada publik sebelum proses autopsi bahwa ada

luka tembak di tubuh Siyono. "Jadi, justru kalimat luka tembak itu muncul dari polisi sendiri," ujarnya menambahkan.

Ia juga menyayangkan kepolisian yang mengaitkan pembelaan terhadap Siyono dengan provokasi oleh kelompok-kelompok teroris. Menurut Dahnil, kebanyakan masyarakat saat ini sudah rasional dan lebih mudah memilah informasi.

Dahnil menegaskan, upaya yang dilakukan tim advokasi semata guna mencari keadilan untuk Suratmi (29 tahun) yang merupakan istri Siyono. Upaya tersebut ia harapkan juga dapat memperbaiki institusi Polri.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Edi Putra Hasibuan menegaskan bahwa anggota Densus 88 harus dihukum oleh peradilan pidana jika terbukti bertindak sewenang-wenang hingga menyebabkan kematian Siyono. "Sebagai anggota Densus, hukumannya pasti lebih berat daripada masyarakat biasa," kata Edi, kemarin.

Menurutnya, setiap pelanggaran prosedur yang dilakukan anggota kepolisian harus dipertiksa. Ia menekankan anggota Densus 88 harus tetap mengedepankan HAM dalam penindakan

12 April 2016

Republika - 12/04/2016

# Komnas HAM: Siyono tak Melawan

● DYAH RATNA META NOVIA,  
INTAN PRATIWI

**Siyono disebut tewas akibat patah tulang dada.**

JAKARTA — Komnas HAM mengumumkan hasil autopsi terhadap jenazah Siyono (34 tahun), warga Klaten yang tewas selepas dijemput Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88). Hasil autopsi itu diklaim mementahkan alasan kepolisian bahwa Siyono tewas setelah melakukan perlawanan terhadap petugas.

"Dari seluruh rangkaian autopsi ini, tidak adanya perlawanan dari luka-luka yang diteliti. Jadi, tidak ada perlawanan dari Siyono. Tidak ada luka defensif dari Siyono," ujar Komisioner Komnas HAM Siane Indriyani, Senin (11/4). Kesimpulan tersebut disepakati sembilan dokter forensik dari PP Muhammadiyah dan satu dokter forensik Polda Jawa Tengah yang melakukan autopsi.

Autopsi terhadap jenazah Siyono dilakukan pada Ahad (3/4) menyusul permintaan keluarga Siyono. Permintaan itu disampaikan Suratmi, istri Siyono, kepada PP Muhammadiyah yang kemudian menggandeng Puseham UII, Komnas HAM, dan LSM Kontras untuk melakukan advokasi.

Sianne mengatakan, Siyono juga mengalami luka di kepala kendati tak

fatal.

Autopsi juga menemukan lima tulang iga Siyono patah. Patahan tulang dada itu yang dinilai menewaskan Siyono. Tim forensik juga menyimpulkan, Siyono tak pernah di-autopsi sebelumnya.

Anggota Tim Forensik Muhammadiyah Dokter Rorri Hartono mengatakan, luka lebam di bagian belakang tubuh Siyono mengindikasikan ia menerima kekerasan saat bersandar pada bidang keras. "Bekas luka itu ada di seluruh tubuh dari kepala, pundak, kaki. Luka-luka itu ada saat kondisi Siyono masih dalam keadaan hidup," kata Rorri Hartono.

Tim advokasi juga mengungkapkan, Suratmi dan kakak Siyono, Wagiyono, mendapatkan bundelan berisi Rp 100 juta dari Polri. Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, uang itu disertai rayuan untuk tak mempersoalkan kematian Siyono.

Menurut Busyro, PP Muhammadiyah akan melakukan rapat dengan Komnas HAM dan elemen-elemen masyarakat sipil guna merancang langkah selanjutnya. "Kami ingin mengangkat masalah ini tak sampai hanya autopsi."

Di pihak lain, Karopenmas Polri Brigjen Agus Rianto menegaskan

**Indepth**  
Pro-Kontra  
Hindari  
Cara-Cara  
Kekerasan  
Him-8



versi kepolisian soal kematian Siyono. "Pernyataan kita seperti yang pernah disampaikan Kadiv Humas (Irjen Anton Charliyan) dan Kapus Dokkes (Brigjen Arthur Tampi) beberapa waktu yang lalu," ujar Agus, kemarin.

Menurut versi kepolisian, Siyono adalah petinggi kelompok Jemaah Islamiyah yang mengetahui tempat persembunyian sejumlah senjata api dan peluru. Ia kemudian dicokok dari kediamannya di Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, Selasa (8/3).

Dua hari setelah penangkapan,

Siyono yang tak diborgol melakukan perlawanan dalam mobil. Seorang anggota Densus 88 yang mengawalinya membalas hingga menewaskan Siyono.

"Penyebab kematian adalah terjadi pendarahan di belakang kepala akibat benturan benda tumpul," ujar Arthur di Mabes Polri, Senin (14/3). Pihak Divisi Propam Polri saat ini tengah mengusut kasus itu dan akan menyidangkan petugas bersangkutan.

rahmat fajar ed: fitriyan zamzami



**HASIL AUTOPSI** Anggota Tim Dokter Forensik Indonesia cabang Jawa Tengah Gatot Suharto (kiri), Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas (tengah), dan Komisioner Komnas HAM Siane Indriani saat memberikan keterangan pers terkait hasil autopsi dari tim forensik Muhammadiyah terhadap jenazah Siyono di kantor Komnas HAM, Senin (11/4). Hasil autopsi disebut mengindikasikan Siyono tak pernah melawan petugas Detasemen Khusus Antiteror 88 saat ditahan.

# Hindari Cara-Cara Kekerasan

● INTAN PRATIWI, UMI NUR FADHILAH

**Kasus Siyono bisa menyeret pemberi perintah.**

JAKARTA — Koordinator Kontras Haris Azhar menilai, kasus kematian Siyono menunjukkan bahwa cara-cara kekerasan harus dihindari dalam penanganan terorisme. Praktik-praktik kekerasan ia khawatirkan akan menebar kebencian dan memicu balas dendam pada aparat keamanan.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara baik dan berlaku kepada siapa pun," ujar Haris saat ditemui *Republika* di kantor Komnas HAM, Senin (11/4). Ia mengingatkan, dugaan kepolisian soal keterlibatan Siyono dalam organisasi terorisme baru sebatas klaim.

Kematian Siyono di tangan Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) tanpa menguji klaim itu ke pengadilan bisa ditafsirkan bahwa polisi sedang melakukan diskriminasi. "Itu implikasi buruk," kata Haris.

Haris berharap, ke depan, hal ini bisa menjadi evaluasi soal penggunaan kewenangan Densus 88 selama ini. "Ini harus ada evaluasi. Kalau enggak, bahaya ke depan," ujarnya menambahkan.

Ia mengatakan, advokasi yang dilakukan semata untuk keadilan. Dalam satu dan lain hal, advokasi tersebut juga bagian dari deradikalisasi. Dengan mendapatkan keadilan, keluarga Siyono, terutama istri dan anaknya, bisa jauh-

kan dari implikasi radikalisme.

Sedangkan, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir meminta kasus tewasnya Siyono di tangan aparat penegak hukum harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Ia mengatakan, kasus kesewenang-wenangan aparat penegak hukum itu dapat menjadi sorotan dunia internasional.

**Kepolisian harus bisa transparan dan objektif dalam penanganan kasus Siyono tersebut.**

"Kita sudah menandatangani konferensi internasional antipenyiksaan, (kalau tidak diproses) bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Nanti kita bisa jadi sorotan internasional," kata dia saat dihubungi *Republika*, kemarin.

Ia menegaskan, proses hukum yang menimpa aparat penegak hukum harus diadili dan diproses secara profesional.

Tidak hanya diadili secara profesi, tapi juga diproses di pengadilan negeri. "Seperti halnya masyarakat yang melakukan, seperti itu diadili di pengadilan negeri," katanya menjelaskan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Achyar Salmi menyepakati hal tersebut. Ia menilai, kasus kematian Siyono dapat dibawa ke ranah hukum.

Sebagai warga negara, pihak keluarga melalui tim advokasi Siyono bisa mengajukan para personel Densus 88 tersebut ke proses hukum. "Sebagai negara hukum, itu sangat dimungkinkan. Sebagai warga negara, jika dia merasa dirugikan oleh pihak manapun, dia berhak membawanya ke proses hukum," ujar Achyar.

Proses hukum terhadap personel kepolisian, lanjut Achyar, akan menggunakan proses pengadilan pidana biasa, termasuk penyidik yang berasal dari kepolisian. Namun, Achyar mengingatkan, pihak kepolisian harus bisa transparan dan objektif dalam penanganan kasus Siyono tersebut.

Hal ini terkait dengan kredibilitas terhadap institusi Polri itu sendiri. "Banyak masyarakat kita ini terkadang sudah antipati terlebih dahulu. Ini kesempatan polisi untuk membuktikan," ujar Achyar.

Achyar pun menilai, dalam kasus kematian Siyono, tidak hanya pelaku, tapi juga bisa saja orang yang memberi perintah dapat dibawa ke proses hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 KUHP terkait pihak-pihak yang dianggap turut melakukan atau membantu tindak pidana. ■ *reja irfa widodo ed: fatriyan zamzami*

# Polri Siap Tanggung Jawab

● RAHMAT FAJAR,  
DYAH RATNA META NOVIA

## Komisi III meragukan Siyono seorang teroris yang harus ditangkap Densus 88.

JAKARTA — Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan, siap bertanggung jawab bila terdapat kejang-galan dalam pemberantasan terorisme. Ia merespons hasil autopsi Siyono, warga Klaten, yang tewas setelah dijemput Detasemen Khusus (Densus) 88.

Hasil autopsi atas Siyono yang diumumkan Muhammadiyah dan Komnas HAM, Senin (11/4), mengungkapkan, Siyono tak pernah melawan petugas Densus, seperti yang sebelumnya dinyatakan kepolisian. Ia meninggal karena patah tulang dada.

"Saya siap untuk dikoreksi," ujar Badrodin, di Rupatama Mabes Polri, Selasa (12/4). Ia mempersilakan anggotanya yang melakukan pelanggaran pidana dalam kematian Siyono diproses sesuai hukum yang berlaku.

Semuanya dapat disidangkan apabila terdapat pelanggaran, baik etik maupun disiplin. "Kita di Polri sudah ada mekanisme. Ada irwasum yang melakukan pengawasan, ada propam yang melakukan pemeriksaan," ujar Badrodin.

Propam, jelas dia, sedang bekerja memproses dugaan pelanggaran pro-

sedur tersebut. Nantinya akan dicocokkan hasil autopsi Muhammadiyah dengan proses yang saat ini sedang dilakukan oleh propam.

Untuk itu, Badrodin menegaskan, kesimpulan jenis pelanggaran yang dilakukan Densus 88 tergantung pemeriksaan propam. Polri juga perlu melihat perkelahian yang menyebabkan seseorang tewas apakah yang dilakukan Densus 88 bentuk pembelaan diri atau bukan.

Polri juga akan memeriksa anggota Densus 88 yang diduga melakukan pemukulan terhadap Siyono. Hal tersebut, kata Badrodin, guna membuktikan temuan Muhammadiyah bahwa tidak ditemukan luka defensif pada Siyono.

Mantan kapolri Da'i Bachtiar mengapresiasi Polri yang memberikan empatan kepada Muhammadiyah dan Komnas HAM mengautopsi jenazah Siyono. Menurut dia, kalau ada yang perlu diperbaiki, sebaiknya diperbaiki, dikoreksi. "Sebab, saya yang melahirkan Densus 88."

Ia berpesan kepada Densus 88 agar memperkuat kemampuan analisis, penyelidikan kejahatan, dan kemampuan menindak. Tiga kemampuan tersebut harus terus dipelihara. Ia menyebut, Densus 88 bisa berintrospeksi dan harus lapang dada kalau hasil autopsinya kredibel.

"Kita penegak hukum, seperti Polri sampai Densus 88, tak boleh melanggar hukum. Harus taat pada hukum itu sendiri," ujar Da'i. Ia men-

jelaskan, ideologi terorisme jangan selalu dihadapi dengan kekerasan, tetapi dengan otak.

Kemarin, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa menyatakan, komisi akan memanggil Kapolri Badrodin Haiti terkait kematian Siyono.

Komisi, kata dia, mengagendakan pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rabu (13/4), sedangkan dengan Kapolri pada Rabu pekan berikutnya.

Ia menambahkan, Komisi III mempunyai tiga catatan atas kematian Siyono.

Catatan itu termasuk pertanyaan apakah betul Siyono memang seorang teroris. "Apakah betul Siyono seorang teroris sehingga harus ditangkap oleh Densus 88?" tanya Desmond. Ia juga mempertanyakan benar tidak Siyono berkelahi dengan Densus 88.

Ia masih meragukan Siyono berkelahi dengan anggota densus saat ditangkap dan diperiksa. "Kami pun mempertanyakan uang yang diberikan kepada keluarga Siyono," katanya. Ia anggap ini merupakan wajah polisi dalam menghargai nyawa seseorang.

Pada rapat tersebut, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat menyampaikan kesimpulan mengenai penyelidikan kematian Siyono, yaitu adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Densus 88.

Menurut dia, dalam penyelidikan Komnas HAM, tidak ditemukan tanda-tanda Siyono melakukan perlakuan. Hal itu terlihat dari tidak adanya bekas-bekas luka di tangan pada jenazah Siyono. Penyebab kematian adalah rasa sakit akibat patah tulang rusuk yang menembus jantung.

### Uang densus

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, Muhammadiyah bersama Komnas HAM melakukan advokasi terhadap kasus kematian Siyono yang tak wajar karena selama ini terbiasa menerima laporan masyarakat terkait tuntutan keadilan.

"Banyak warga yang menderita akibat diperlakukan tak adil lapor kami," katanya saat di DPR. Muhammadiyah serta Komnas HAM, ungkap dia, karena Suratmi, istri Siyono, membuat surat kuasa untuk mengungkap apa yang terjadi pada Siyono.

Ia juga menyinggung soal uang Rp 100 juta yang diberikan densus kepada Suratmi. Waktu itu, jelas dia, Suratmi datang ke Muhammadiyah dengan membawa segepok uang yang diserahkan polwan di salah satu hotel. Namun, Suratmi memutuskan menolak uang itu karena hatinya merasa terganggu.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, uang senilai Rp100 juta yang diterima Suratmi tidak berasal dari kas negara, tetapi dari Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. "Itu uang pribadi kadensus," katanya menegaskan.

■ umi nur fadhilah/antara ed: ferry kishihandi



Densus  
Ciptakan  
Radikalisasi

Hlm-9

## **Panduan Wawancara**

Hari/Tanggal : 31 Maret 2016

Pukul : 13.00 WIB

Narasumber : Penasehat Hukum Siyono Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum  
(Koordinator Tim Pembela Kemanusiaan) Kasus Meninggalnya Terduga Teroris Siyono.

1. Bagaimana proses awal bisamenjadipengacara Siyono ?
2. Bagaimana awal mulabisaditangkap dan bisadisebutsebagai terduga teroris?
3. Apakah benar Siyono adalah ketua Jamaah Islamiyah (JI)?
4. Status Siyono sebelum meninggal tersangka atau terduga ?
5. Apakah Densus 88 sudah memenuhi SOP atau belum dalam sebuah penangkapan terhadap terduga teroris Siyono?
5. Bagaimana hukum dua anggota densus 88 tersebut?
5. Benarkah peristiwa di mobil, atau di tempat lain?
6. Siapa saja pihak yang terlibat?
7. Bagaimana sebenarnya fakta yang ada di media?



### Contoh Tabel Skema Berita pada struktur Sintaksis

<b>Headline (Judul)</b>	Densus Jangan Langgar HAM
<b>Sub Judul</b>	Asas Praduga Tak Bersalah Berlaku Bagi Terduga Teroris
<b>Lead</b>	Datasemen Khusus 88 Antiterror Kepolisian Republik Indonesia diingatkan agar jangan melanggar hak asasi manusia dalam menanganu sejumlah terduga teroris. Densus88 juga diminta agar memperhatikan asas praduga tak bersalah para terduga teroris yang mereka tangkap.
<b>Latar Informasi</b>	<p>1. Wakil ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Densus 88 agar memperhatikan asas praduga tak bersalah yang juga berlaku untuk terduga teroris. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dalam penanganan terorisme.</p> <p>2. Menurut Nasir, Densus 88 perlu mencontoh transparasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang selalu merekam proses pengeledahan rumah atau kantor tersangka korupsi atau mereka yang terkait dengan tersangka.</p> <p>3. Pernyataan Fadli dan Nasir tersebut menanggapi meninggalnya terduga teroris Siyono setelah ditangkap petugas Densus 88. Siyono yang diduga pimpinan Jamaah Islamiyah di Klaten, Jawa Tengah, ditangkap Densus 88 pada 9 Maret lalu.</p>
<b>Kutipan, sumber pernyataan</b>	<p>1. Wakil Ketua DPR Fadli Zon  “Terorisme memang kejahatan luar biasa. Namun pada penanganannya tetap harus menjunjungga asas praduga tak bersalah. Jangan sampai ada abuse of power, apalagi sampai ada pelanggaran HAM”</p> <p>2. . Anggota Komisis III DPR M Nasir Djamil  Penanganan terorisme seharusnya dilakukan secara transparan. Selain menghindari kecurigaan publik, penanganan secara terbuka dapat menghindarkan aparat dari tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM.  “Sehingga kalau ada yang yang menyampaikan kecurigaan, Densus 88 tinggal memberikan rekamannya”.</p> <p>3. Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia Palma  Polri harus memberikan kesetaraan kepada terduga teroris, terutama pada penyelidikan ketika mereka belum terbukti sebagai teroris. Menurut dia, pemeriksaan terduga teroris tetap harus menghormati HAM.</p>

	<p>4. Koordinator Komisis untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan Haris Azhar Penyelidikan kematian Siyono perlu melibatkan pihak eksternal, seperti Komisis Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman RI. Haris mengatakan, Polri tidak bisa mengambil alih tugas penegakan hokum sekaligus mengklarifikasi sendiri dugaan kesalahan penanganan prosedur penanganan kasus.</p> <p>5. Kepala Divisi Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah memulai penyelidikan dugaan kelalaian anggota Densus 88 sehingga menyebabkan kematian Siyono. Ia menambahkan, Siyono mengalami pendarahan di kepala bagian belakang setelah menyerang anggota Densus 88 dalam perjalanan menuju tempat penyimpanan alat bukti di Prambanan, Yogyakarta.</p>
<b>Penutup</b>	Dalam daftar pencarian orang yang dirilis Polda Sulteng dan sejumlah foto serta video yang didapat dari telepon seluler anggota teroris yang tewAs diketahui, Santoso dan Basri berambut panjang.

## Curriculum Vitae

### Data Pribadi

Nama : WindaRahayu  
 Tempatlahir : Temanggung  
 Tanggalahir : 27 Oktober 1993  
 JenisKelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Status : Mahasiswi  
 AlamatRumah : Manukan, RT 06 RW 04, Condongcatur, Depok, Sleman

No. Hp : 089675131992  
 Alamat Email : [windarhy@gmail.com](mailto:windarhy@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Sekolah/Universitas	Fakultas	Jurusan	Tahun
SD N 02 Candiroto	-	-	2000 - 2006
SMPN 01 Ngadirejo	-	-	2006 - 2009
MAN Godean	-	IPA	2009 - 2012
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Fakultas Agama Islam	Komunikasi dan Penyiaran Islam	2013 - Sekarang

### Pengalaman Organisasi

Organisasi	Jabatan	Periode
RPC UMY (unit kegiatan mahasiswa photography)	Koordinator Media	2016-2017
RPC UMY (unit kegiatan mahasiswa photography)	Bendahara 2	2015 - 2016
FORKOM JOGJA	Anggota	2015 - Sekarang
RPC UMY	Humas Internal	2014 - 2015
BEM KM UMY	Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2014 - 2015

### Pengalaman Kegiatan

Kegiatan	Jobdesk	Tahun
Musyawarah Agung Senapati	Kesekretariatan	2017
Jogja International Heritage World	Media Relation	2016
Biennale Jogja XIII	Exhibition guide	2015
OSDI (Orientasi Study Dasar Islam) UMY	Pemandu	2015
Hunting Besar RPC UMY	Sponsorship	2015
AMSS 2015 (ASEAN MUSLIM STUDENT SUMMIT)	Konsumsi	2015
RELOAD 4 dan Launching Buku RPC UMY	Sponsorship	2015
KULIAH UMUM DAN	Sponsorship	2015

SANTUNAN ANAK YATIM KKI UMY		
STUDENT FAIR UMY	Keamanan Internal	2014
MATAF (OSPEK) UMY	Pemandu dan Keamanan Internal	2014
PAMERAN DAN BEDAH BUKU REVOLUSI BUKU	Perkap	2014
WORKSHOP SERIAL PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN	Bendahara	2013
PAMERAN FOTOGRAFI DIKSAR RPC UMY	Konsusmsi	2013

**Keahlian :**

Memotret / Photography

Mengoperasikan komputer (Ms. Word, Ms. Excel)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan referensi dan pertimbangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Winda Rahayu